BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksakan otonomi adalah dengan melihat besar nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. PAD yang kecil akan mempersulit daerah dalam melaksanakan proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah secara mandiri. Padahal dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah dituntut untuk mampu membiayai dirinya sendiri. Dengan besarnya tuntutan kepada daerah untuk dapat melaksanakan otonomi daerah, maka setiap daerah dituntut untuk mengoptimalkan peran PAD didalamnya.

Dalam pasal (1) ayat (5) dijelakan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah serta masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (desentralisasi). Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervise, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dibidang ekonomi, otonomi daerah disatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional didaerah dan dilain pihak dibukanya peluang bagi pemerintah mengembangkan kebijakan regional dan local untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi didaerah (Setyawan, 2004).

Pada era otonomi daerah sekarang ini daerah dituntut untuk lebih mandiri, baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mendanai keuangan daerahnya. Setiap daerah harus mampu mengelola dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk menjunjung keberhasilan otonomi daerah, diantaranya : sumber daya manusia (SDM), Pengelolaan sumber daya alam, kemampuan mengelola keuangan daerah, kondisi sosial budaya masyarakat, dan kemampuan manajemen (Halim, 2004).

Pelaksanaan otonomi di Indonesia diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pemerintah pusat dan daerah yang transparan, efektif dan efisien yang pada akhirnya akan merangsang pembangunan ekonomi di daerah yang bersangkutan. Pemerintah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing masing sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah (Mulyanto, 2007:27). Agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, pengelolaan keuangan daerah hendaknya disusun dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistim yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna

mendukung pembangunan ekonomi daerah (PP No.58 Tahun 2005 pasal 4 (ii). APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat yang tercermin dalam Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Keberhasilan dalam menjalankan otonomi daerah ini tentu tidak terlepas dari perana Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah. Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

PAD sebagai salah satu penerimaan daerah, mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Dengan berkurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat, maka PAD di daerah menjadi sumber keuangan utama. Kegiatan ini hendaknya didukung juga oleh kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan negara (Koswara,2000:50). Berikut realisasi penerimaan pemerintah provinsi Indonesia tahun 2019.

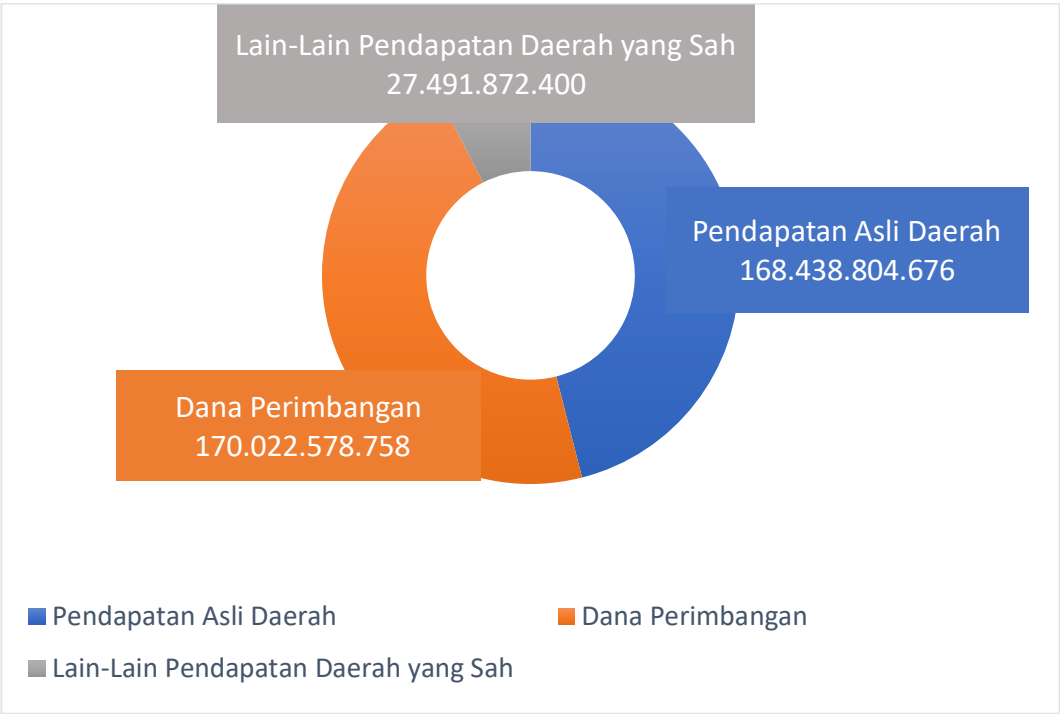

Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019 (Milyar Rupiah)

Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2016-2019, diolah

Dilihat dari Gambar 1.1 pada tahun 2019 bahwa penerimaan PAD provinsi di Indonesia berkontribusi sebesar Rp168.438.804.676 milyar terhadap Pendapatan Daerah secara nasional, akan tetapi jumlahnya masih berada dibawah Dana Perimbangan yaitu sebesar Rp170.022.578.758 milyar. Hal ini menunjukkan kurangnya kontribusi PAD disetiap provinsi, sehingga di beberapa provinsi PAD nya masih ada yang rendah mencerminkan di beberapa provinsi tingkat kemandiriannya masih rendah. Adapun perkembangan PAD provinsi di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut.

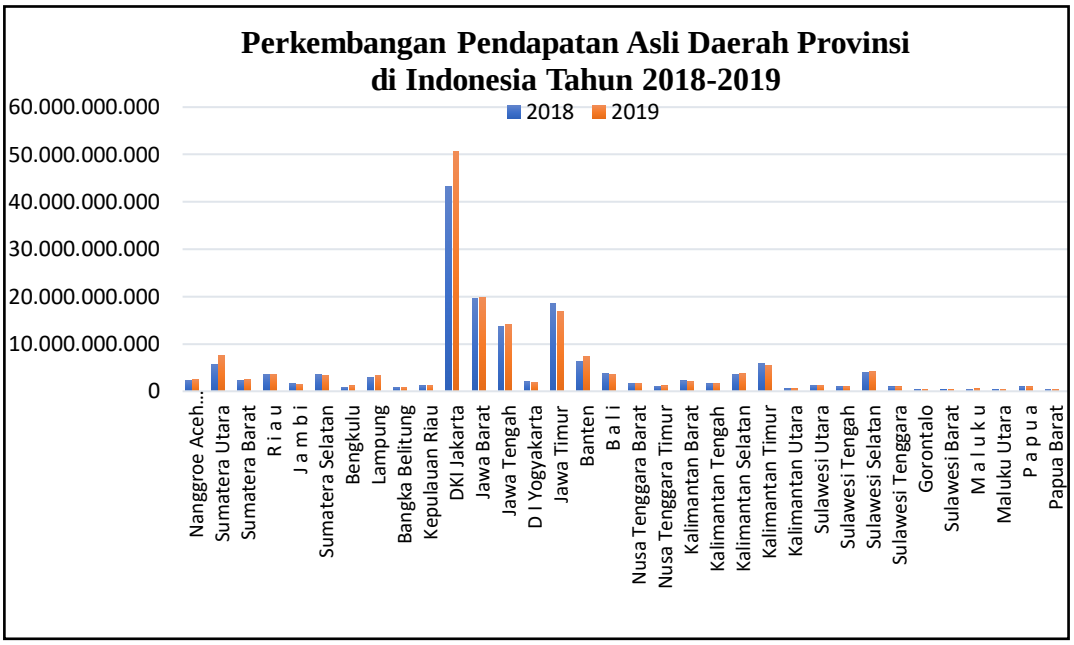

Gambar 1.2 PAD Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2019 (Milyar Rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik

PAD provinsi di Indonesia cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dilihat dari Gambar 1.2 provinsi dengan PAD terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp43.327.136.602 milyar pada tahun 2018, meningkat sebesar Rp50.624.330.154 milyar pada tahun 2019. Sedangkan untuk provinsi dengan PAD yang relatif kecil adalah Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp301.499.588 milyar pada tahun 2018, dan meningkat sebesar Rp370.109.976 milyar pada tahun 2019. Berdasarkan gambar diatas, secara garis besar hampir semua provinsi mengalami kenaikan, disamping itu juga ada beberapa provinsi yang mengalami penurunan sehingga terjadinya fluktuasi dibeberapa provinsi setiap tahunnya. Sementara itu terjadi penurunan PAD di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp18.531.062.021 milyar pada tahun 2018, menurun sebesar Rp16.825.138.567 milyar pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga

jika melihat potensi wilayah di setiap provinsi terlihat adanya kesenjangan pendapatan asli daerah.

Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif di berbagai sektor mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perkembangan produksi suatu sub sektor dalam PDRB berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat setempat, sehingga dengan sendirinya akan berdampak pada meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah di daerah bersangkutan. Perkembangan PDRB provinsi di Indonesia tahun 2018-2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

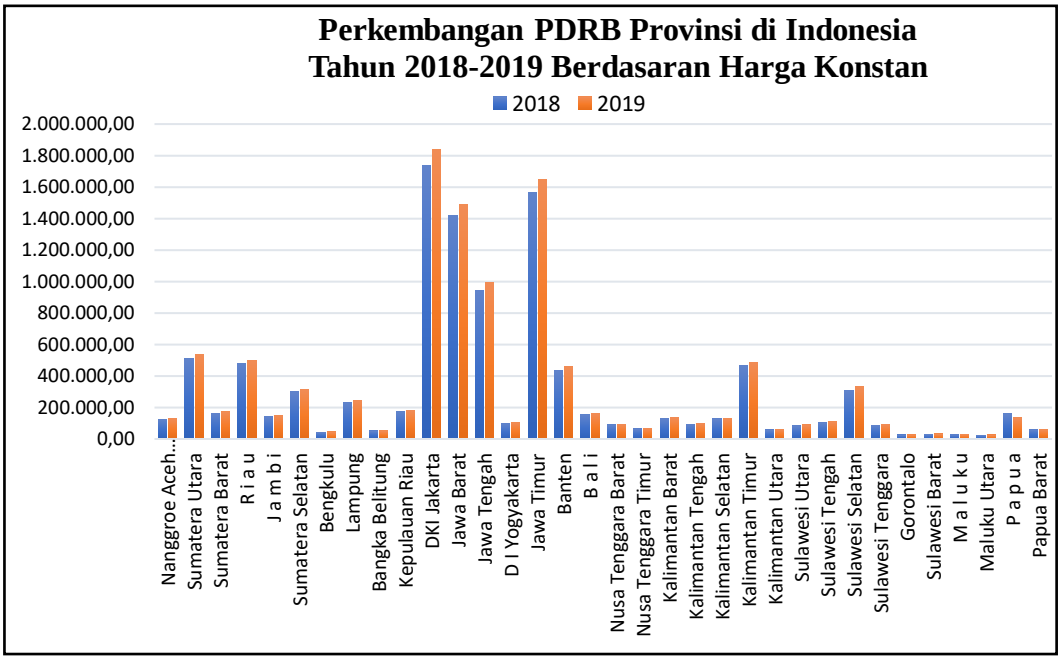

Gambar 1.3 PDRB Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2019 Berdasarkan Harga Konstan (Milyar Rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dilihat dari Gambar 1.3 Pertumbuhan PDRB provinsi di Indonesia cenderung menigkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDRB provinsi terbesar di Indonesia

adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.736.291,30 milyar pada tahun 2018, meningkat sebesar Rp1.838.500,71 milyar pada tahun 2019. Sementara itu Pertumbuhan PDRB provinsi terendah di Indonesia adalah Maluku Utara sebesar Rp25.050,12 milyar pada tahun 2018, dan meningkat sebesar Rp26.586,03 milyar pada tahun 2019. Meskipun demikian pertumbuhan PDRB setiap provinsi di Indonesia cenderung meningkat.

Pertumbuhan PDRB provinsi di Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun tentunya merupakan potensi yang sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah di beberapa provinsi untuk menaikkan PAD. Simanjuntak dalam Halim (2001), juga mengemukakan jika suatu daerah dapat mengelola sumber daya alam yang dimiliki dan perekonomiannya berkembang dengan baik maka PDRB perkapita akan meningkat yang memperkuat PAD suatu daerah.

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh variabel lain, salah satunya adalah jumlah penduduk (Atmaja 2012:8). Jumlah serta mutu penduduk suatu daerah merupakan unsur penentu yang paling penting bagi kemampuan memproduksi serta standart hidup suatu negara atau daerah. Namun demikian, yang paling utama mengapa masalah penduduk ini sangat menarik perhatian para pakar ekonomi adalah karena penduduk itu merupakan sumber tenaga kerja, human resource, disamping sumber faktor produksi skill (Rosyidi, 2002:87). Oleh karena itu jumlah penduduk sangat berpengaruh dalam menetukan besarnya produksi suatu daerah. Dengan demikian jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap PAD di daerah tersebut. Perkembangan tingakat jumlah

penduduk provinsi di Indonesia Tahun 2018-2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

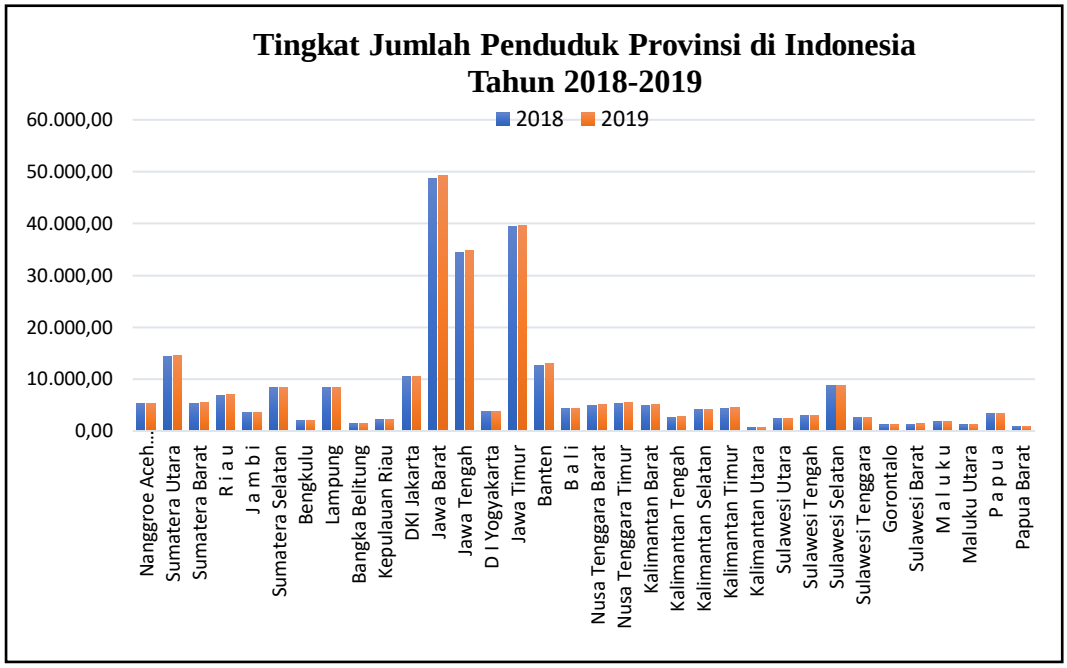

Gambar 1.4 Jumlah Penduduk Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2019 (Jiwa)

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dilihat pada Gambar 1.4 Tingkat Jumlah Penduduk provinsi di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Provinsi dengan tingkat jumlah penduduk terbesar adalah Provinsi Jawa Barat sebanyak 48.683,7 jiwa pada tahun 2018, bertambah sebesar 49.316,7 jiwa pada tahun 2019. Sementara provinsi dengan tingkat jumlah penduduk terkecil peningkatannya adalah Kalimantan Utara sebanyak 682,8 jiwa pada tahun 2018, bertambah 695,6 jiwa pada tahun 2019 dan Provinsi Papua Barat sebanyak 937,5 jiwa pada tahun 2018, bertambah 959,6 jiwa pada tahun 2019. Meningkatnya jumlah penduduk maka akan semakin besar jumlah pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Karena jumlah Penduduk merupakan

faktor yang sangat penting sebagai wajib pajak. Karena pajak adalah gejala sosial, artinya pajak hanya terdapat di dalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat berarti tidak ada pajak sebab pajak dipungut untuk kepentingan masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu jumlah penduduk sangat berpengaruh sebagai sumber pajak yang mana sumber pajak tersebut bisa meningkatkan PAD.

Pengeluaran Pemerintah dari kebijakan fiskal yang merupakan Tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah akan menghasilkan produk-produk yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemajuan tingkat perekonomian. Proses pertumbuhan kegiatan ekonomi dalam masyarakat akan meningkatkan PAD bagi pemerintah daerah. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat juga akan meningkatkan pendapatan mereka pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi, pada akhirnya akan menaikkan PAD melalui sumber dana pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain pendapatan daerah. Pengeluaran pemerintah provinsi di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut.

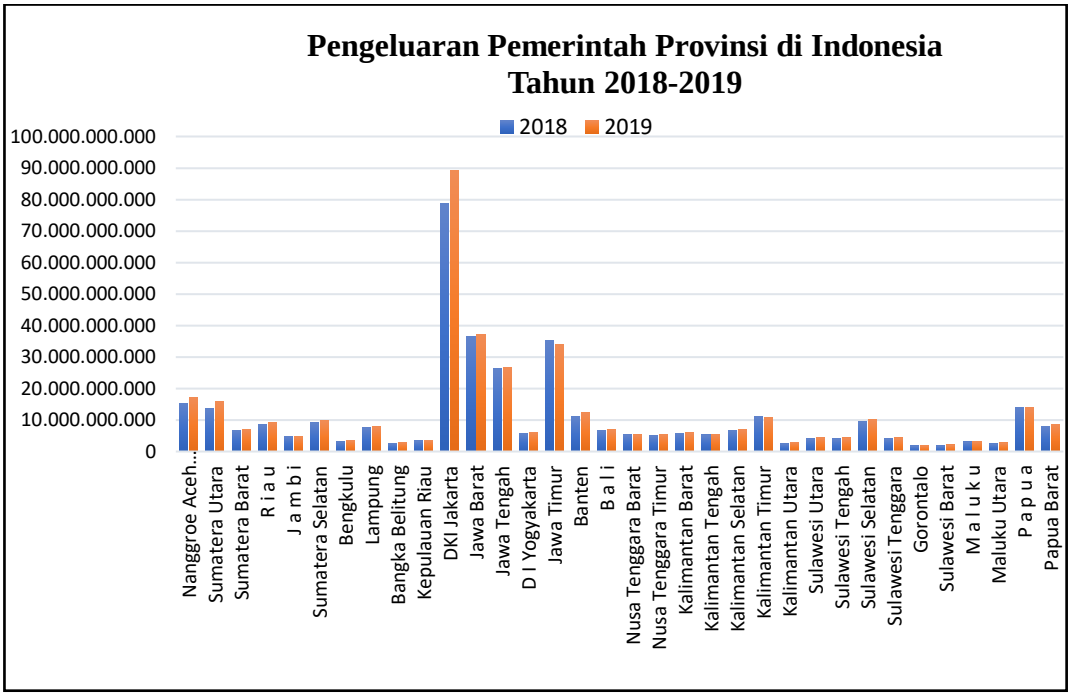

Gambar 1.5 Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2019 (Milyar Rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dilihat dari Gambar 1.5 Pengeluaran Pemerintah provinsi di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Provinsi dengan pengeluaran pemerintah terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp78.671.227.891 milyar pada tahun 2018, meningkat sebesar Rp89.088.351.843 milyar pada tahun 2019. Sementara provinsi dengan pengeluaran pemerintah terkecil adalah Provinsi Gorontalo sebesar Rp1.889.286.424 milyar pada tahun 2018, meningkat sebesar Rp1.955.666.594 milyar pada tahun 2019. Provinsi Gorontalo merupakan provinsi dengan total belanja daerah yang paling rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya, namun terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pendanaan dari pemerintah pusat.

Pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasana yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak swasta. Dikatakan pula bahwa pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam belanja pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang.

Menurut Mangkoesoebroto (1998), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah mentapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam artian riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dari uraian latar belakang tersebut, sehingga judul penelitian yang diambil penulis adalah **"Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2019".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan pokok yang ada pada latar belakang diatas, dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi di Indonesia tahun 2014-2019?
2. Bagaimana Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi di Indonesia tahun 2014-2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan maka tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi di Indonesia tahun 2014-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah provinsi di Indonesia tahun 2014-2019.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat berguna untuk berbagai pihak, adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini peneliti dapat memiliki pengetahuan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Bagi pemerintah, dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui faktor apa yang lebih dominan dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi di Indonesia.
3. Bagi pihak lain, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Indonesia, tepatnya di Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder yaitu publikasi laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi di Indonesia, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah melalui website resmi dari Badan Pusat Statistik Indonesia.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini diawali sejak bulan Oktober 2020, diawali dengan pengajuan judul kepada pihak jurusan Ekonomi Pembangunan.

Tabel 1.1

Jadwal Kegiatan Penelitian

Keterangan	Tahun 2020												Tahun 2021							
	Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul																				
Penngumpulan Data																				
Penyusunan UP dan Bimbingan Penelitian																				
Seminar Usulah Penelitian																				
Pengolahan Data																				
Penyusunan Skripsi dan Bimbingan																				
Ujian Skripsi dan Komprehensif																				

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustaka ini, penulis akan mengemukakan teori-teori yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi dan akan dijadikan landasan teoritis dalam melaksanakan penelitian. Dimulai pengertian secara umum, sampai pada pengertian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun 2016-2019).

Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Jenis Pendapatan dalam Struktur Anggaran Pendaptatan dan Belanja daerah.

2.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak dibagi menjadi dua yaitu :

a. Pajak Provinsi

Pajak Provinsi Meliputi :

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan disemua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun.

Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam. Berikut ini rinciannya :

a) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.
b) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%.
c) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%.
d) Bagi kepemilikan kendaran bermotor alat berat sebesar 0,20%.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut :

a) Penyerahan pertama sebesar 10%
b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%

Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut :

a) Penyerahan pertama sebesar 0,75%
b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBB-KB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroprasi di atas air.

Pajak PBB-KB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Tarif PBB-KB :

a) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5%
b) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud
c) pada poin sebelumnya, dapat diubah oleh pemerintah dengan peraturan presiden, dalam hal :
   (1) Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam undang-undang tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.
   (2) Diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
d) Dalam harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada poin kedua huruf a sudah kembali normal, Peraturan Presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan.

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya. Pajak air tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka

pengendalian air tanah dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Tarif pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah :

a) Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah
b) Nilai Perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut :
   (1) Jenis sumber air
   (2) Lokasi/zona pengambilan sumber air
   (3) Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air
   (4) Volume air yang diambil atau dimanfaatkan
   (5) Kualitas air
   (6) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air.
c) Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
d) Penghitungan Harga Dasar Air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dengan cara mengalikan faktor nilai air dengan Harga Air baku.
e) Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Air Baku Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota
f) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%
g) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

5) Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat.

a) Objek pajak dari Pajak Rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
b) Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar Pajak Rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai.
c) Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha kena Cukai.
d) Subjek pajak dari Pajak Rokok ini adalah konsumen rokok.
e) Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Pembagian pajak provinsi ke kabupaten/kota diatur dalam pasal 95 dengan persentase yang ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi dan alokasinya dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah. Dalam undang-undang tersebut terdapat sisi kelemahan yaitu tidak adanya sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi mengenai keterlambatan penyaluran ke kabupaten/kota. Hal ini diperlukan agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kepastian untuk memprediksi arus kas masuk dan dapat digunakan untuk mendukung program kegiatan yang dianggarkan dalam APBD. Apabila tidak

terdapatnya sanksi tentu Pemerintah Provinsi melakukan penyaluran tidak sesuai dengan ketentuan sehingga merugikan daerah secara berkelanjutan. Perubahan regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki kepastian dalam proses penganggaran dan pelaksanaan.

2.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemda secara langsung dan nyata kepada pembayar. Retribusi daerah antara lain adalah pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, penggantian biaya cetak peta, pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi daerah, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek, dan lain-lain (Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun 2016-2019).

2.1.1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga (Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun 2016-2019).

2.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah (Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun 2016-2019).

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam ruang lingkup suatu negara dikenal istilah yang disebut : Gross National Product (GNP) yang berarti Produk Nasional Kotor, sedangkan dalam suatu kesatuan wilayah yang lebih rendah hal ini disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan sebagai Produk Nasional Kotor yang dapat mencakup suatu negara kesatuan wilayah tertentu.

Apabila ditarik pengertian tersebut dalam suatu wilayah (*region*) tertentu maka diperoleh Produk Regional Kotor yang sebenarnya merupakan perkiraan pendapatan yang diterima oleh penduduk suatu wilayah yakni jumlah seluruh pendapatan sebagai balas jasa penggunaan faktor-faktor produksi oleh wilayah. Dengan kata lain Produk Domestik Regional Bruto dapat diartikan sebagai : Estimasi total produk barang dan jasa yang diterima oleh masyarakat suatu daerah sebagai balas jasa dari penggunaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Dalam hal ini maka pendapatan yang dihasilkan atas penggunaan faktor-faktor tetapi berada di luar wilayah tersebut tidaklah diperhitungkan.

Mankiw (2006) dalam konsep dasar ekonomi makro indikator yang digunakan

dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, adalah produk domestik bruto (PDB). Dalam konsep regional Produk Domestik Bruto dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan satu indikator ekonomi untuk mengukur kemajuan pembangunan di suatu wilayah. Sebagai nilai dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi, PDRB bermanfaat untuk mengetahui tingkat produk netto atau nilai tambah yang dihasilkan seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi, dan pola/struktur perekonomian pada satu tahun atau periode di suatu negara atau wilayah tertentu (Prihatin, 1999).

PDRB adalah nilai tambah barang atau jasa yang diperoleh didalam suatu wilayah atau daerah dalam satu tahun tertentu. Semakin besar PDRB maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin tinggi. Perkembanga PDRB atas harga berlaku dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan PDRB yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan perubahan dalam tingkat harganya, untuk dapat mengukur perubahan volume produksi atau perkembangan produksi secara nyata, faktor pengaruh harga perlu dihilangkan dengan cara menghitung PDRB atas dasar harga konstan (Alista, 2014).

Sedangkan PDRB menurut BAPPEDA (2014) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai

tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakakn untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

2.1.2.1 Pendekatan Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut BAPPEDA tahun 2012 untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diciptakan dari suatu daerah, ada 3 pendekatan yang digunakan, yaitu :

a. Pendekatan Produksi

PDRB merupakan selisih antara nilai barang/jasa (output) yang dihasilkan, dengan adanya biaya (input) antara yang digunakan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut. Berbagai jenis unit kegiatan ekonomi, sesuai dengan karakteristik barang dan jasa yang dihasilkan akan dikelompokkan ke dalam 9 (Sembilan) lapangan usaha atau sektor, yaitu :

1) Pertanian
2) Pertambangan dan penggalian
3) Industri pengolahan
4) Listrik, gas dan air bersih
5) Kontruksi

6) Perdagangan, hotel dan restoran
7) Transportasi dan komunikasi
8) Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan
9) Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah

b. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan (*income approach*) adalah suatu pendekatan dimana pendapatan nasional diperolah dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagi dari faktor produksi yang menyumbang terhadap proses produksi. Dalam hubungan ini pendapatan nasional adalah penjumlahan dari unsur-unsur atau jenis-jenis pendapatan.

1) Kompensasi untuk pekerja (*compensation for employees*), yang terdiri dari upah (*wages*) dan gaji (*salaries*) ditambah faktor rent terhadap upah dan gaji (misalnya kontribusi pengusaha untuk rencana-rencana pensiun dan dana jaminan sosial), dan ini merupakan komponen terbesar dari pendapatan nasional.
2) Keuntungan perusahaan (*corporate profit*), yang merupakan kompensasi kepada pemilik perusahaan yang mana sebagian dari padanya digunakan untuk mambayar pajak keuntungan perusahaan (*corporate profity takes*), sebagian lagi dibagikan kepada para pemilik saham (*stockholders*) sebagai deviden, dan sebagian lagi ditabung perusahaan sebagai laba perusahaan yang tidak dibagikan.

3) Pendapatan usaha perorangan (*proprietors income*), yang merupakan kompensasi atas penggunaan tenaga kerja dan sumber-sumber dari *self employeed person*, misalnya petani, *self employeed profesional*, dan lain-lain. dengan perkataan lain *proprietors income* merupakan pendapatan *new* korporasi.
4) Pendapatan sewa (*rental income of person*), yang merupakan kompensasi untuk pemilik tanah, *rental business* dan *recidential properties*, termasuk didalamnya pendapatan sewa dari mereka yang tidak terikat dalam bisnis real estate : pendapatan sewa dihitung untuk rumah-rumah yang *non form* yang dihuni oleh pemiliknya sendiri dan royalti yang diterima oleh orang dari hak paten, hak cipta, dan hak terhadap sumber daya alam.
5) Bunga netto (*net interest*) terdiri atas bunga yang dibayar perusahaan dikurangi oleh bunga yang diterima oleh perusahaan ditambah bunga netto yang diterima dari luar negeri. Bunga yang dibayar oleh pemerintah dan yang dibayarkan oleh konsumen tidak termasuk didalamnya. Secara matematis pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$NI = Yw + Yi + Ynr + Ynd$$

Dimana:

Yw = Pendapatan dari upah, gaji dan pendapatan lainnya sebelum pajak

Yr = Pendapatan dari bunga

Ynr dan Ynd = Pendapatan dari keuntungan dari perusahaan dan pendapatan lainnya sebelum pendapatan lainnya sebelum pengenaan pajak.

c. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah pendekatan pendapatan nasinal atau produk domestik regional bruto diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir (*final demand)* atas output yang dihasilkan dalam perekonomian, diukur pada harga pasar yang berlaku. Dengan perkataan lain produk nasional atau produk domestik regional bruto adalah penjumlahan nilai pasar dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi dan jasa-jasa (C), permintaan sektor bisnis barang-barang investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang-barang dan jasa-jasa (G), dan pengeluaran sektor luar negri untuk kegiatan ekspor dan impor (X-M).

Menurut BPS (2016) untuk Menyusun PDB maupun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai ativitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

a. PDRB menurut lapangan usaha

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 (Sembilan) lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang

mencakup lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan, dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, kontruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya.

b. PDRB menurut pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 (tujuh) komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

2.1.3 Jumlah Penduduk

Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah. Di negara berkembang yang mengalami ledakan penduduk seperti Indonesia akan selalu mengaitkan antara kependudukan dan ledakan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dialami

oleh setiap negara, dengan demikian tiap negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas juga (Sucipto: 1998).

Kependudukan dalam Bahasa Yunani *"Demos"* yang artinya rakyat atau penduduk yang merupakan hal penting didalam pembangunan ekonomi yang merupakan penggerak dan pelaksanaan ekonomi di samping sebagai sumber tenaga kerja. Aspek positif dimana penduduk yang besar akan mampu mendorong pembangunan itu sendiri, jumlah penduduk yang besar tidak diiringi dengan perluasan wilayah kesempatan kerja semakin besar, oleh karena itu jumlah penduduk disuatu wilayah mempunyai arti sangat penting terutama dengan membuat suatu perencanaan pembangunan, sehingga perencanaan yang dihasilkan lebih realistis (perwira jaya, widanta, 2014: 204-205). Dampak negatif pertumbuhan penduduk adalah meningkatnya permintaan layanan sosial dan ekonomi untuk memenuhi hak-hak dasar mereka yang jumlahnya meningkat. Penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal menetap dalam suatu wilayah.

Todaro (2003) mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk bukanlah suatu masalah. Pengaruh jumlah penduduk pada tingkat moderat pada dasarnya positif dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi, baik bagi negara-negara maju, maupun yang sedang berkembang. Semakin banyak orang, maka semakin banyak ide, semakin banyak orang yang mempunyai bakat dan kreativitas, semakin banyak tenaga ahli dan dengan demikian akan semakin berkembang teknologi, selanjutnya dalam jangka Panjang penduduk merupakan suatu keuntungan.

Anata (2008:37) menjelaskan bahwa, penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap, baik yang produktif atau tidak produktif. Penduduk yang produktif merupakan harapan dari pemerintah daerah, semakin penduduk produktif maka semakin besar kesempatan kerja yang tercipta, selain itu juga jumlah penduduk kota yang di imbangi dengan SDM yang telah terdidik akan membantu membangun pemerintah daerah. Oleh karena itu penduduk sangat menentukan perekonomian di pemerintahan, baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

Smith berpendapat bahwa dengan didukung bukti empiris bahwa pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat meningkatkan *output* melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar. Pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi didalam produksi. Penambahan penduduk merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya penduduk dapat memperngaruhi pendapatan, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat di tarik juga meningkat.

2.1.4 Pengeluaran Pemerintah

Dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera pemerintah menjalankan berbagai macam program pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah dalam melakukan pembangunan membutuhkan dana yang cukup besar, pengeluran pemerintah mencerminkan kombinasi produk yang dihasilkan untuk

menyediakan barang publik dan pelayanan kepada masyarakat yang memuat pilihan atas keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit.

Menurut Mangkoesoebroto (1994) anggaran surplus digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah inflasi. Sedangkan anggaran defisit digunakan jika pemetintah ingin mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran maka pemerintah dapat meningkatkan pengluarannya. Pemerintah Indonesia membagi pengeluaran pemerintah menjadi dua macam, antara lain :

2.1.4.1 Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan pemeliharaan dan penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi dibedakan menjadi dua subsidi daerah dan subsidi harga barang), pembayaran angsuran dan bunga utang negara. Anggaran belanja rutin tersebut memiliki peran yang sangat penting guna menunjang jalannya pemerintahan, oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam penggunaan anggaran rutin tersebut agar terjadi kesinambungan antara jumlah pengeluaran dengan hasil yang didapatkan. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan

pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta menjaga stabilitas perekonomian (Mangkoesoebroto, 1994).

2.1.4.2 Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran Pembangunan merupakan semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja pemerintah pusat (Undang-Undang No 19 Tahun 2001). Namun pengelompokan di atas hanya berlaku hingga 2001. Karena adanya Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 29 Tahun 2002, terjadi perubahan dalam pengelompokan belanja daerah. Perubahan dalam belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja transfer dan belanja tidak tersangka.

a. Belanja Aparatur Daerah

Belanja aparatur daerah adalah belanja yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh aparatur. Belanja aparatur terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal.

b. Belanja Pelayanan Publik

Belanja pelayanan publik adalah belanja yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh aparatur, tetapi dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Belanja pelayanan publik terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan meliharaan dan belanja modal.

c. Belanja Transfer

Pengeluaran Transfer adalah pengalihan uang dari pemerintah daerah dengan kriteria :

1) Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti layaknya terjadi transaksi pembelian dan penjualan.
2) Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan, seperti layaknya yang diharapkan pada suatu investasi.

d. Belanja tidak tersangka

Pengeluaran tidak tersangka adalah pengeluaran yang disediakan untuk pembiayaan, antara lain :

1) Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat membahayakan daerah.
2) Tagihan tahun lalu yang belum diselesaikan atau tidak tersedianya anggarannya pada tahun yang bersangkutan.
3) Pengambilan penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) atau kelebihan penerimaan.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (provinsi ataupun kabupaten/kota) yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Sesuai pemendagri nomor 13 tahun 2006 telah ditentukan bahwa struktur belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan

belanja langsung. Belanja tidak langsung, meliputi : belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung meliputi : belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

2.1.4.3 Teori Pengeluaran Pemerintah

Dasar terori pengeluaran pemerintah adalah identitas keseimbangan pendapatan nasional (Y=C+I+G+(X-M)) dimana Y menggambarkan pendapatan nasional sekaligus penawaran agregat, permintaan agregat digambarkan pada persamaan C+I+G+(X-M) dimana G merupakan pengeluaran pemerintah yang merupakan bentuk dari campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Kenaikan atau penuruanan pengeluaran pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijaksanaan tersebut. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan kegiatan swasta (Dumairy, 1996:161-164).

2.1.4.4 Konsep Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pengeluaran untuk mengembangkan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat. Pembelian pemerintah atas barang dan jasa dapat digolongkan menjadi dua

golongan utama yaitu pengeluaran penggunaan pemerintah atas konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah (Sadono Sukirno, 2004).

2.1.4.5 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Menurut Suparmoko (2000:4) Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi hingga dapat dibedakan menjadi empat klasifikasi sebagai berikut :

a. Pengeluaran pemerintah merupakan investasi untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan dating.
b. Pengeluaran pemerintah langsung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
c. Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang akan dating.
d. Penggeluaran pemerintah merupakan sarana penyedia kesempatan kerja yang lebih banyak dan penyebaran daya beli yang lebih luas.

Berdasarkan penelitian di atas suparmoko (2000:45) membedakan bermacam-macam pengeluaran negara, sebagai berikut :

a. Pengeluaran yang *self liquiditing* sebagian atau seluruhnya, artinya dari pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa atau barang yang bersangkutan. Contohnya, pengeluaran untuk jasa negara pengeluran untuk jasa-jasa perusahaan pemerintah atau untuk proyek-proyek produktif barang ekspor.
b. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, dimana dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain pada akhirnya akan menaikan penerimaan pemerintah.

Misalnya, pemerintah menetapkan pajak progresif sehingga timbul redistribusi pendapatan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan masyarkat.

c. Pengeluaran yang tidak *self liquiditing* maupun yang tidak produktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, untuk bidang rekreasi, objek-objek pariwisata dan sebagainya. Sehingga hal ini dapat juga menaikkan penghasilan dalam kaitannya jasa-jasa tadi.
d. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan, misalnya untuk pembiayaan pertahanan atau perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan yang menerimanya akan naik.
e. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang.

2.2 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu sejenis mengenai Pendapatan Asli Daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, berperan penting dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini dapat dilihat dalam tabel penelitian terdahulu sebagai berikut.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Metode	Kesimpulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indriatno, Milina & Budi, 2017	Pengaruh Investsi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah serta Tenaga Kerja terhadao PAD dan Pertumbuhan Ekonomi	Investsi Swasta, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja	Metode Regresi Linier, path analysis dan time series	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh dan signifikan, sedangkan Investasi Swasta dan Tenaga Kerja berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
Fiqih Abdul, 2011	Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kota Tangerang Pada Tahun 2004-2008	Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Pendapatan lain-lain yang sah	Dengan mengguna kan analisis linear berganda	Hasil penelitian yaitu Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Pendapatan lainlain yang sah secara simultan mampu menjelaskan dan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan PAD
Gitaningtyas dan Kurrohman, 2014	Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Investasi swasta terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/ Kotta di Provinsi Jawa Timur.	PDRB, Jumlah Penduduk, Investasi swasta, Pendapatan Asli Daerah	Metode *purposive sampling.*	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa semua variabel independen PDRB, jumlah penduduk dan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Asmuruf,dkk (2015)	Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Sorong	Pendapatan Asli Daerah, PDRB, Jumlah Penduduk	Metode Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variable PDRB tidak berpengaruh secara siginifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan variable Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
Prabwa Agus, 2009	Analisis Fakor-faktor Yang Mempengaru hi Tingkat pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas	Pajak Daerah Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Bagian Laba BUMD), Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Metode anlisis linear berganda	Hasil penelitian ini yang diperoleh dari variabel pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah baik secara bersamasama/serentak maupun secara parsial memberikan pengaruh yang sangat signifikan positif terhadap PAD
Susanto Iwan, 2013	Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus Kota Malang Tahun 19982012)	PDRB, Penduduk, Inflasi, Pendapatan Asli Daerah	Metode anlisis linear berganda	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel PDRB, penduduk, dan inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap PAD kota Malang.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kusrini Diyah, 2015	Analisis Pengaruh Belanja Langsung, PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah **(**Studi Kasus Kabupaten/ Kota Provinsi Sematera Selatan Tahun 2010-2014)	Belanja Langsung, PDRB, Jumlah, Penduduk Pendapatan Asli Daerah	Metode data panel	Hasil penelitian menyatakan variabel belanja langsung dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan jumlah penduduk tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini akan menjelaskan hubungan logis antara variable-variabel yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dan akan dijelaskan dalam sub-bab ini. Seperti halnya pendapatan asli daerah sendiri bertujuan untuk memberi kewenangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan asli daerah dalam penelitian ini dipengaruhi oleh produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah.

2.3.1 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto terhadap PAD

Produk domestik regional bruto menjadi salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah. Santosa dan Rahayu (2005) mengatakan bahwa meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-

program pembangunan yang akan meningkatkan output di setiap sektor pembangunan.

Pembangunan di segala bidang yang menjangkau seluruh pelosok memerlukan data produk domestik regional bruto (PDRB) sesuai dengan batas-batas wilayah administrasi pemerintahan untuk perencanaan pembangunan. Dalam kerangka dasar ekonomi regional ada dua kelompok besar yang menjadi dasar transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu : kelompok produsen dan konsumen. Kelompok produsen menggunakan faktor produksi yang berasal dari kelompok konsumen yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kelompok konsumen memiliki faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal dan kewiraswastaan yang diberikan pada perusahaan dan menerima balas jasanya berupa sewa tanah, upah dan gaji, bunga modal dan keuntungan. Balas jasa yang diterima ini disebut nilai tambah, yang selanjutnya digunakan oleh konsumen untuk membeli barang dan jasa dari produsen untuk konsumsi. Transaksi dari kedua kelompok tersebut terjadi secara berkesinambungan dan membentuk siklus gambaran perekonomian di suatu wilayah atau daerah.

PDRB adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahunnya. Melihat terjadi banyaknya transaksi yang berkesinambungan dan membentuk siklus perekonomian yang membesar dalam artian ada peningkatan jumlah transaksi, bisa menjadi dasar bahwa adanya kesejahteraan masyarakat atau mencerminkan masyarakat mempunyai pendapatan dengan bukti adanya transaksi ekonomi. Ketika seseorang mempunyai pendapatan

maka akan menambah kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Dapat di analogikan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah (Provinsi). Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Kursini Diyah pada tahun 2015 bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Jadi dengan adanya peningkatan PDRB akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.3.2 Hubungan Jumlah Penduduk terhadap PAD

Pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD jumlah serta mutu penduduk suatu daerah merupakan unsur penentu yang paling penting bagi kemampuan memproduksi serta standar hidup suatu negara atau daerah. Namun demikian, yang paling utama mengapa masalah penduduk ini sangat menarik perhatian para pakar ekonomi adalah karena penduduk itu merupakan sumber tenaga kerja, *human resource*, disamping sumber faktor produksi skill (Rosyidi, 2002:87).

Jumlah penduduk merupakan faktor yang sangat penting sebagai wajib pajak. Karena pajak adalah gejala sosial artinya pajak hanya terdapat di dalam masyarakat. Jika tidak ada masyaraka berarti tidak ada pajak, sebab pajak dipungut untuk kepentingan masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, hubungan antara pajak dan masyarakat erat sekali. Pajak-pajak di dalam masyarakat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi.

Jumlah penduduk sangat berpengaruh dalam menetukan besarnya produksi suatu daerah karena ada masyarakat atau penduduk maka akan ada potensi

penerimaan daerah, karena masyarakat merupakan objek pajak juga sebagai wajib pajak dan retribusi, dimana sumber penerimaan pajak dan retribusi itu berasal dari masyarakat atau penduduk. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Gitanigtias dan Kurrohman pada tahun 2014 bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

2.3.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD

Santosa dan Rahayu (2005) mengatakan bahwa pemerintah mempunyai peran dalam pembangunan yaitu sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitator pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan ekonomi. Pengeluaran yang diwujudkan dalam belanja daerah digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan diberbagai jenis infrastruktur yang penting. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregar dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi sehingga secara tidak langsung penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat.

Pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak terpenuhi oleh swasta. Dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam belanja pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang.

Pengeluaran pemerintah ini digunakan untuk mendorong aktivitas ekonomi sehingga akan adanya pemanfaatan layanan publik yang akan memperlancar kegiatan perekonomian yang mengacu pada tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menyebabkan masyarakat disuatu wilayah provinsi mampu membayar kewajiban yaitu pajak yang dipungut pemerintah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap meningkatnya PAD. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriatno, Milina dan Budi pada tahun 2017 yang menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut.

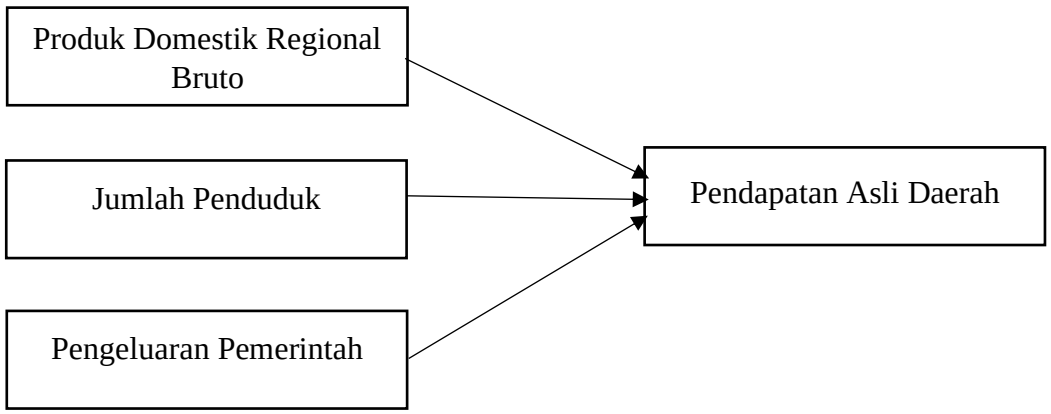

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis menentukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap provinsi di Indonesia tahun 2014-2019.
2. Diduga Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap provinsi di Indonesia tahun 2014-2019.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah provinsi tahun 2004-2019. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengambil data pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah dari penerbitan laporan Badan Pusat Statistik Indonesia serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

3.2 Metode Penelitian

Metode adalah cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, misalnya untuk menguji hipotesis dengan menggunakan teknis serta alat-alat analisis tertentu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dalam penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data cross section dan data time series dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Menurut Kasiran (2008), kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan proses data-data yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, mengenai apa yang sudah terjadi. Sedangkan pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2006) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau

menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk mebuat kesimpulan yang lebih luas.

3.2.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono:2006). Sesuai dengan judul ”Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2014-2019”, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan dua variable, yaitu :

a. Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2006), variabel independen adalah variabel yang menjadi penyebab adanya atau timbulnya perubahan variabel dependen, disebut juga variebel yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah.

b. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2006), variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau dikenal juga sebagai variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah pendapatan asli daerah.

Untuk lebih jelasnya operasional variabel ini penulis sajikan dalam bentuk tabel 3.1

Tabel 3.1

Operasional Variabel

Nama Variabel	Definisi Variabel	Notasi	Satuan	Skala
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi penerimaan (Provinsi) yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah ,meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan air dan pemanfaatan air bawah tanah, pajak rokok. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah	Y	Milyar (Rp)	Rasio
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Nilai barang dan jasa yang diproduksi masyarakat di wilayah provinsi dalam waktu satu tahun	X_1	Milyar (Rp)	Rasio
Jumlah Penduduk	Masyarakat yang berdomisili ataupun bertempat tinggal di suatu daerah Provinsi	X_2	Jiwa	Rasio
Pengeluaran Pemerintah	Total dari semua belanja yang dilakukan oleh pemerintah baik berupa pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan	X_3	Milyar (Rp)	Rasio

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilaksanakan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari, memahami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada untuk mengetahui apa yang sudah ada dan belum ada dalam bentuk jurnal-jurnal atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Data sekunder yang diperoleh kemudian diolah kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini (Sugiyono: 2006).

Data diperoleh dari berbagai dokumen resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen resmi lainnya dipandang cukup mewakili sejauh mana pengaruh variabel-variabel independent terhadap variabel dependen.

3.2.2.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder gabungan *cross section* dan *time series* (*Panel*), yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasi oleh instansi tertentu. Dalam penelitian ini data yang digunakan diperoleh dari laporan Badaan Pusat Statistik Indonesia dan penelitian terdahulu.

3.2.2.2 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur yang dilakukan penulis dalam memilih objek penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penulis melakukan studi kepustakaan guna mendapatkan pemahaman mengenai teori-teori yang berhubungan dengan objek penelitian,
2. Penulis melakukan survei pendahuluan melalui situs resmi BPS di www.bps.go.id, Jurnal dan penelitian terdahulu untuk memperoleh objek atau data yang akan diteliti.

3.3 Model Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka peneliti menguraikannya dalam bentuk model penelitian, pada penelitian ini terdiri dari variabel independent yaitu produk domestik regional bruto (X_1), jumlah penduduk (X_2) dan pengeluaran pemerintah (X_3) serta variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah (Y) provinsi di Indonesia.

Adapun model penelitian ini sebagai berikut :

$$\mathbf{logY_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 logX_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 logX_{3it} + e_{it}}$$

Keterangan :

Y = pendapatan asli daerah

α = Konstanta

X_1 = produk domestik regional bruto

X_2 = jumlah penduduk

X_3 = pengeluaran pemerintah

$\beta_{(1,2,3)}$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

e = *Error term*

t = Waktu

i = Provinsi

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Analisis Regresi Data Panel

Dalam penelitian alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel yang mana merupakan kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Dipilihnya data panel dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan rentang waktu beberapa tahun dan juga terdapat banyak daerah. Penggunaan data *time series* dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan rentang waktu 6 tahun yaitu dari tahun 2014-2019. Kemudian penggunaan *cross section* itu sendiri karena penelitian ini mengambil data dari provinsi di Indonesia.

Data panel secara substansial dapat mengurangi masalah omitted variabel. Model yang mengabaikan tentang variabel yang relevan. Untuk mengatasi interkorelasi diantara variabel–variabel bebas yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak tepatnya penaksiran regresi sehingga metode panel lebih tepat digunakan.

3.4.1.1 Teknik Estimasi Model Regresi Data Panel

Menurut Basuki dan Prawoto (2017: 276) terdapat tiga model yang dapat digunakan untuk melakukan regresi data panel, tiga model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. *Common Effect Model (CEM)*

Pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengombinasikan data *time series* dan *cross section* lalu mengestimasinya dengan menggunakan pendekatan kuadrat terkecil *Ordinary Least Square (OLS)*.

Persamaan metode ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + ... + \beta_n X_{nit} + e_{it}$

Keterangan:

Y = Variabel dependen

α = Konstanta

X 1 = Variabel Independen 1

X 2 = Variabel Independen 2

β = Koefesien Regresi Variabel Independen

e = *error term*

i = *cross section*

t = *time series*

b. *Fixed Effect Model (FEM)*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya, dimana setiap individu merupakan parameter yang tidak diketahui. Oleh karena itu, untuk mengestimasi data panel *Fixed Effect Model (FEM)* menggunakan teknik *variable dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar daerah. Perbedaan intersep tersebut dapat terjadi karena adanya

perbedaan. Namun demikian slopnya sama antar daerah, model estimasi ini disebut juga dengan teknik *Least Square Dummy Variable (LSDV).*

Persamaan metode ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \propto_i + \beta_j X_{it}^{j} + \sum_{i=2}^{n} \alpha_i D_i + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Variabel terikat provinsi ke-*i* pada waktu ke-*t*

X_{it}^{j} = Variabel bebas ke-*j* provinsi ke-*i* pada waktu ke-*t*

D_i = *Dummy variabel*

ε_{it} = Komponen *error* provinsi ke-*i* pada waktu ke-*t*

α = *Intercept*

β_j = Parameter untuk variabel ke-*j*

c. *Random Effect Model (REM)*

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Keuntungan menggunakan *Random Effect Model (REM)* ini yakni dapat menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini disebut juga dengan *Error Component Model (ECM)*. Metode yang tepat untuk mengakomodasi *Random Effect Model (REM)* adalah *Generalized Least Square (GLS).*

Persamaan *random effect* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_j X_{it}^{j} + \varepsilon_{it} \; ; \; \varepsilon_{it} = u_i + V_t + W_{it}$$

Keterangan:

u_i = Komponen *error cross-section*

V_t = Komponen *time series*

W_{it} = Komponen *error* gabungan

3.4.2 Pemilihan Model Data Panel

Tahap dalam memilih metode dalam data panel. Pertama kita harus membandingkan *PLS* dengan *FEM* terlebih dahulu. Kemudian dilakukan uji F jika hasil menunjukkan model *PLS* yang diterima, maka model *PLS* lah yang akan dianalisa. Tapi jika model *FEM* yang diterima, maka tahap kedua dijalankan yakni melakukan perbandingan lagi dengan model *REM*. Setelah itu dilakukan pengujian dengan *Hausman test* untuk menentukan metode mana yang akan di pakai apakah *FEM* atau *REM* Jika hasil yang didapat menunjukan *REM* maka perlu digunakan uji LM (*Lagrange Multiplier)* yaitu *REM* dengan *CEM*.

3.4.2.1 *PLS vs FEM* (Uji *Chow*)

Pengujian untuk menentukan *Fixed Effect Model (FEM)* atau *Common Effect Model (CEM)* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Berikut adalah hipotesis dalam pengujian uji chow :

H_0 : $\beta_{1,2,3} = 0$ menggunakan *Common Effect Model (CEM)*

H_a : $\beta_{1.2,3} \neq 0$ menggunakan *Fixed Effect Model (FEM)*

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut :

a. Jika nilai Probabilitas F > 0,05 artinya H_0 tidak ditolak maka *Common Effect Model (CEM).*
b. Jika nilai Probabilitas F < 0,05 artinya H_0 ditolak maka *Fixed Effect Model (FEM),* dilanjut dengan uji hausman.

3.4.2.2 *FEM vs REM* (Uji *Hausman*)

Pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect Model (FEM)* atau *Random Effect Model (REM)* yang paling tepat digunakan. Berikut adalah hipotesis dalam pengujian uji hausman :

H_0 : $\beta_{1,2,3} = 0$ menggunakan *Random Effect Model (REM)*

H_a : $\beta_{1,2,3} \neq 0$ menggunakan *Fixed Effect Model (FEM)*

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji hausman adalah sebagai berikut :

a. Jika nilai probabilitas *Chi-Square* > 0,05, maka H_0 tidak ditolak yang artinya *Random Effect Model (REM)*.
b. Jika nilai probabilitas *Chi-Square* < 0,05, maka H_0 ditolak, yang artinya *Fixed Effect Model (FEM).*

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Basuki dan Prawoto (2017:297) uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi data panel. Sebelum melakukan pengujian hipotesis yang diajukan dalam

penelitian perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)* adalah sebagai berikut :

3.4.3.1 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinearitas yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak *orthogonal*. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam regresi adalah dengan cara sebagai berikut :

a. Jika nilai koefisien kolerasi (R^2) > 0,80, terjadi multikolinearitas.
b. Jika nilai koefisien kolerasi (R^2) < 0,80, tidak terjadi multikolinearitas

3.4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain sama maka disebut homokedastisitas. Dan jika varian berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2013). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji *Glejser* yakni meregresikan nilai mutlaknya. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

H_0 : $\beta_{1,2,3} = 0$ tidak ada masalah heteroskedastisitas

H_a : $\beta_{1,2,3} \neq 0$ ada masalah heteroskedastisitas

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji *Glejser* adalah sebagai berikut :

a. Jika nilai probabilitas > 0,05 maka H_0 ditolak, artinya ada masalah heteroskedastisitas.
b. Jika nilai probabilitas < 0,05 maka H_0 tidak ditolak, artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas.

3.4.4 Uji Hipotesis

Uji Statistik dilakukan untuk mengukur ketetapan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Uji statistik dilakukan dengan koefesien determinannya (R^2), pengujian koefesiensi regresi secara parsial (Uji t) dan pengujian koefesiensi regresi secara bersama-sama (Uji F).

3.4.4.1 Koefesien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa baik dalam analisis, yang ditunjukkan oleh nilai R^2 dalam bentuk persentase. Nilai R^2 berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Semakin besar R^2 menunjukkan semakin baik kualitas dari model tersebut, karena akan dapat menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dan sisanya tidak dijelaskan dalam model. Semakin tinggi nilainya semakin erat pula hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen (Gujarati, 2013).

3.4.4.2 Koefesien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Penelitian ini membandingkan signifikansi masing-masing variabel independen dengan taraf sig $\alpha = 0{,}05$. Apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis tidak ditolak, yang artinya variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka variabel tersebut memiliki pengaruh yang kecil. Hipotesis dalam uji t ini adalah :

$H_0 : \beta_{1,2,3} \leq 0$

Secara parsial variabel independen produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen pendapatan asli daerah provinsi di Indonesia.

$H_a : \beta_{1,2,3} > 0$

Secara parsial variabel independen produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap variabel dependen pendapatan asli daerah provinsi di Indonesia.

Dengan demikian keputusan yang diambil adalah:

a. H_0 tidak ditolak jika nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$

   Semua variabel independen produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah tidak signifikan terhadap variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah provinsi di Indonesia.

b. H_0 ditolak jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$

Semua variabel independen produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah signifikan terhadap variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah provinsi di Indonesia.

3.4.4.3 Koefesien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang terdapat dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai probabilitas signifikansinya. Jika nilai probabilitas signifikansinya kurang dari lima persen maka variabel independen akan berpengaruh secara signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis dalam uji F ini adalah :

$H_0 : \beta = 0$

Secara bersama-sama variabel independent produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap variabel dependen pendapatan asli daerah provinsi di Indonesia.

$H_a : \beta > 0$

Secara bersama-sama variabel independent produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap variabel dependen pendapatan asli daerah provinsi di Indonesia.

Dengan demikian keputusan yang diambil adalah :

a. H_0 tidak ditolak jika nilai $F_{statistik} \leq F_{tabel}$

Semua variabel pertumbuhan produk domesitik regional bruto, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pendapatan asli daerah provinsi di Indonesia.

b. H_0 ditolak jika nilai $F_{statistik} > F_{tabel}$

Semua variabel pertumbuhan produk domesitik regional bruto, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pendapatan asli daerah provinsi di Indonesia.